



Press Release, Tanggal 5 April 2011

Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional Telah Dimulai di BPKP

Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 356 Tahun 2010 memiliki peran strategis untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014.

Sejak terbentuknya pada tanggal 8 November 2010 lalu, tim ini akhirnya mengawali tugasnya dengan melakukan penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKP. Tim Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Reformasi Birokrasi Nasional menetapkan BPKP sebagai instansi yang pertama kali dilakukan penjaminan kualitas reformasi birokrasinya karena dinilai paling siap mengingat BPKP telah memulai proses ini sejak tahun 2003. Proses reformasi birokrasi di BPKP tersebut semula mencakup tiga area perubahan yaitu organisasi, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur dan berkembang menjadi delapan area perubahan sebagaimana diamanatkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014. Hal ini juga menyiratkan makna bahwa proses pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi di BPKP sudah mulai berjalan.

Ketua Tim QA RBN, Prof. Mardiasmo, didampingi Neneng Goenadi, Lutfi Andi Mutti, dan Jusuf Serang Kasim memulai langkah ini dengan melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Ciawi, Perwakilan DKI 1 dan 2 (4 s.d 5 April 2011). Ketua Tim Penjaminan Kualitas yang juga Kepala BPKP, Mardiasmo, mengatakan bahwa kunjungan ini baru merupakan langkah awal dari pelaksanaan penjaminan kualitas reformasi birokrasi di BPKP. Menurutnya, proses penjaminan kualitas reformasi birokrasi nasional di BPKP akan dilaksanakan oleh Tim Satgas Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) Reformasi Birokrasi Nasional BPKP yang diketuai oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ardan Adiperdana.

“BPKP merupakan instansi pertama yang menjadi target tim Penjaminan Kualitas (QA) Reformasi Birokrasi Nasional dan akan dilanjutkan ke beberapa kementerian/lembaga bahkan sampai ke pemerintah daerah” tegasnya. Ia juga menuturkan bahwa tim ini juga akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk membantu tugas dari tim independen yang diketuai oleh Erry Riyana .

Salah satu anggota tim Penjaminan Kualitas, Lutfi Andi Mutti yang merupakan mantan Bupati Luwu Utara, saat mengunjungi Perwakilan DKI 1 berharap agar proses reformasi birokrasi di BPKP dapat menghasilkan BPKP yang mampu memerankan dirinya sebagai mitra yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mewujudkan *good public and clean governance*. Indikator yang paling nyata dari keberhasilan reformasi birokrasi di BPKP menurut Lutfi adalah keberhasilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini juga yang menurut Lutfi menjadi target dari pemerintah pada tahun 2014.

Sementara itu, Jusuf Serang Kasim yang juga mantan Bupati Tarakan, Kalimantan Timur, berharap agar BPKP lebih bersikap proaktif dalam membantu pemerintah daerah. BPKP menurut Jusuf harus mampu merubah pola pikir *stakeholders* dari yang semula takut akan kehadiran BPKP menjadi membutuhkan kehadiran BPKP. Kehadiran BPKP saat ini, diakuinya justru dirindukan oleh beberapa pemerintah daerah yang memang memiliki komitmen untuk berakuntabilitas. (Humas BPKP)